

Pembangunan Waduk Riam Kiwa Tunggu Menteri Negara Koordinator Perekonomian, Roy Berharap Tahun Ini Mulai Digarap



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/30/pembangunan-waduk-riam-kiwa-tunggu-menko-perekonomian-roy-berharap-tahun-ini-mulai-digarap>

Rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa, yang diyakini menjadi salah satu solusi jangka panjang penanggulangan banjir tahunan di Kabupaten Banjar dan sekitarnya, mendapat angin segar.

Angin itu datang dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).

Saat mengunjungi korban banjir di Kecamatan Sungaitabuk, Banjar, Rabu (29/1), Roy menjelaskan tentang progres rencana waduk tersebut.

Bendungan yang dirancang untuk mengurangi risiko banjir hingga 70 persen itu telah memasuki tahap penyelesaian masalah dampak sosial, termasuk persoalan lahan. Roy bahkan menyampaikan proyek tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun. Saat ini, Ditjen Bina Marga menunggu persetujuan izin dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melanjutkan prosesnya. “Mudah-mudahan proses ini segera selesai, sehingga pelaksanaan dan penandatanganan kontrak bisa dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Pembangunan Bendungan Riam Kiwa diharapkan tidak hanya berfungsi untuk pengendalian banjir. Proyek tersebut diyakini juga mendukung produktivitas sektor pertanian di sekitar wilayah tersebut, dengan menyediakan sumber daya air yang lebih stabil bagi para petani. Roy menambahkan, proyek ini diharapkan dapat dimulai tahun ini, dengan target penyelesaian dalam lima tahun ke depan. “Mohon doa dan dukungannya agar pembangunan bendungan Riam Kiwa bisa segera terlaksana. Kami berharap proyek ini dapat dimulai tahun

ini, sehingga dalam lima tahun ke depan, bendungan ini bisa selesai dan berfungsi optimal,” tambahnya.

Progres waduk Riam Kiwa sebelumnya disampaikan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III , I Putu Eddy Purna Wijaya ST MT di sela peninjauan banjir di Desa Teluk Selong Kecamatan Martapura Barat, Banjar. Dia mengatakan saat ini dalam tahap pengadaan lahan.

“Pengadaan lahan meliputi beberapa tahapan. Saat ini kami mengurus Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK). Kami berkoordinasi dengan kementerian koordinator untuk proses itu. Setelah itu dilaksanakan PDSK,” kata Eddy.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/30/pembangunan-waduk-riam-kiwa-tunggu-menko-perekonomian-roy-berharap-tahun-ini-mulai-digarap>, 30 Januari 2025.
2. https://regional.kompas.com/read/2025/01/30/062850078/banjir-kalsel-pembangunan-bendungan-riam-kiwa-dinilai-jadi-solusi#google_vignette, 30 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.